

## Laporan pelaksanaan Activity 2.4

### To conduct a comparative study on wood-based energy industry development for selected executives and managers to Vietnam

#### 1. Pelaksana *comparative study* ke Viet Nam terdiri dari:

- a. Kementerian LHK: Dirjen PHPL, Direktur UHP, Kasubdit RKUPHT, Kasubdit RKUPHA, dan Kabag Hukum dan Kerja sama Teknis;
- b. Bupati Tapanuli Utara dan Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara
- c. Staf ITTO;
- d. APHI: Waketum APHI, Direktur Eksekutif APHI, Kabid Hutan Tanaman, Kabid Hutan Alam;
- e. ASMINDO: Ketua Asmindo dan Sdri. Sinta Melodiana

#### 2. Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 13 s.d. 19 Mei 2019, dengan pembiayaan untuk personel Kementerian LHK bersumber pada ITTO Project PD 737/III/2019 dan APBN, sedangkan personel di luar Kementerian LHK dibiayai institusi masing-masing.

#### 3. Pokok-pokok kegiatan:

- a. Pertemuan dengan Viet Nam Administration of Forestry (VNFOREST)
- b. Pertemuan dengan Viet Nam Timber and Forest Product Association (VIFORES)
- c. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Hanoi (Bapak Ibnu Hadi)
- d. Kunjungan ke industri pengolahan kayu (*Woodsland Company*)
- e. Kunjungan ke industri *wood pellet*
- f. Kunjungan ke hutan tanaman rakyat dan industri kecil di Provinsi Yen Bai
- g. Kunjungan ke industri kerajinan dan hasil hutan bukan kayu

#### 4. Gambaran umum kehutanan Viet Nam

Viet Nam memiliki luas wilayah 331.231 km<sup>2</sup> atau 33,12 juta Ha (hampir seluas P. Sumatera dikurangi Kepulauan Riau dan Babel), dengan jumlah penduduk 94,67 juta jiwa. Luas hutan negara Viet Nam mencakup area 14,49 juta Ha atau 43,75% dari luas wilayah Viet Nam, yang dikelompokkan menjadi :

- a. Hutan Lindung : 4,59 juta Ha (32 %)
- b. Hutan untuk Penggunaan Khusus : 2,16 juta Ha (15 %) (Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Pendidikan dan Riset)
- c. Hutan Produksi : 7,75 juta Ha (53 %)

Berdasarkan penutupan lahannya, diklasifikasikan dalam Hutan Alam seluas 10,24 juta Ha dan Hutan Tanaman seluas 4,25 juta Ha. Pada tahun 2020 ditargetkan luas hutan negara tersebut bertambah menjadi 16,24 juta Ha. Viet Nam termasuk 5 negara teratas yang berhasil menambah luas hutan.

#### 5. Kebijakan Pengelolaan Hutan di Vietnam

Sejak tahun 2016, kegiatan pemanfaatan hutan difokuskan pada hutan tanaman (HT), dimana perizinan diterbitkan oleh Pemerintah melalui Badan Admintsitasi Kehutanan kepada BUMN, BUMS dan Masyarakat (*Community*). Perizinan dan pengelolaan HT secara umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Izin HT hanya bisa diterbitkan di kawasan Hutan Produksi untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- b. Areal yang dimohon untuk HTI harus sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Rencana Strategis Kabupaten Jangka Panjang.
- c. Luas areal izin yang diterbitkan untuk Kelompok Masyarakat berkisar antara 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha.
- d. Pasca penerbitan izin, Pemegang Izin menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang/*Management Plan* 20 tahun, yang berisikan rencana strategis di bidang produksi (penanaman dan pemanenan), bidang lingkungan (termasuk di dalamnya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan), serta bidang sosial. Rencana kerja ini ditandatangani oleh Manajemen Perusahaan Pemegang Izin atau Manajemen Perusahaan Induk dari Pemegang Izin yang bersangkutan, Rencana Kerja Jangka Panjang tersebut, Pemegang Izin menyusun Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten.
- e. Mengacu pada RKL, Pemegang Izin menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat Rencana Penanaman dan Rencana Pemanenan, yang disusun secara *self – approval* dan menyampaikan laporannya ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Khusus untuk kegiatan pemanenan, harus ada persetujuan/kerjasama pasokan dengan industri pengolah kayu untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi di industri. Secara paralel, pihak industri kayu menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku dalam tahun berjalan, dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Kehutanan terkait.
- f. Dalam hal penatausahaan hasil hutan, Pemegang Izin melaporkan realisasi pemanenan kayu setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan, yang memuat lokasi tebangan/nomor petak, volume kayu yang dipasok ke industri serta copy nota angkutan yang menyertai sarana pengangkutan hasil panen. Kepala Dinas Kehutanan akan melakukan audit jika terdapat/dijumpai penyimpangan dalam penatausahaan hasil hutan tersebut.
- g. Kegiatan perlindungan, pengamanan hutan dan penanganan masalah sosial, baik di areal HTI yang dikelola BUMN/BUMS/masyarakat ditangani oleh *Forest Rangers* (jagawana) di bawah arahan Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan di tingkat tapak dapat ditangani dengan cepat.
- h. Dalam rangka mendorong investasi pembangunan HT yang akan memberikan kontribusi *multiplier effect* berupa pertumbuhan ekonomi wilayah, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, serta mendorong ekspor, Pemerintah memberikan insentif berupa :
  - a. Pembebasan iuran izin
  - b. Pembebasan *Land Tax* (seperti PBB)
  - c. Pembebasan royalti hasil produksi (seperti PSDH)
  - d. Pembebasan PPN kayu log HT
  - e. Pemberian bantuan dana sebesar USD 12 per hektar per tahun yang berasal dari dana *Payment for Forest Environmental Services* (PFES) apabila kelompok masyarakat atau perusahaan mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Dana *Payment for Forest Environmental Services* (PFES) diperoleh dari Perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, air minum/bersih, industri yang menggunakan sumber air dan *ecotourism*.
  - f. Fasilitasi kredit perbankan dengan bunga rendah (sekitar 6 %)

## 6. Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Sektor Hulu dan Hilir

- a. HTI di Vietnam secara garis besar dikelola oleh korporasi dan masyarakat yang terintegrasi dengan industrinya. Sektor hulu dan hilir ini telah menerapkan prinsip optimalisasi rantai nilai industri berdasarkan sumber bahan bakunya. Kayu bulat HT dengan jenis Akasia dan Karet dengan diameter > 12 cm diolah untuk Kayu Gergajian untuk selanjutnya menjadi bahan baku furniture dan sebagian diolah menjadi Veneer.

Pemegang izin HT (skala BUMN/BUMS/skala masyarakat) terintegrasi dengan hilirnya, baik melalui skema integrasi dengan perusahaan induknya maupun kerjasama pasokan bahan baku. Pembangunan industri pengolahan yang mendekati sumber bahan baku, dari yang langsung berada di dekat areal HT maupun dalam radius maksimal 50 Km, menjadikan biaya produksi produk dapat ditekan.

- b. Dari sisi pengelolaan hutan lestari, saat ini setidaknya terdapat 1.700 Ha areal yang telah disertifikasi oleh FSC pada tahun 2016, dan dalam waktu dekat ditargetkan ada tambahan areal yang disertifikasi seluas 2.300 Ha. Meskipun Vietnam saat ini telah menandatangani VPA (*Voluntary Partnership Agreement between Vietnam and European on Forest Law Enforcement Governance and Trade (VPA/FLEGT)*) dengan Uni Eropa, sertifikasi FSC akan terus didorong karena keberterimaannya yang luas di pasar dunia.
- c. Dengan adanya moratorium penebangan hutan alam, pasokan bahan baku saat ini berasal dari HT Akasia, Eukaliptus dan Karet, yang hingga tahun 2018 luasnya mencapai 4,22 juta Ha. Dari angka ini seluas 3 juta Ha ditanami jenis Akasia dan Eukaliptus, selebihnya sekitar 1 juta lebih tanaman karet. Rata-rata daur tanaman adalah 7 tahun, dengan produksi sekitar 100 m<sup>3</sup>/ha. Biaya penanaman relatif rendah sekitar Rp 8 juta/Ha. Dengan insentif bebas iuran izin, bebas PBB, royalty panen dan bebas PPn, dan bunga pinjaman yang rendah, tidaklah mengherankan meskipun luas per unit pengelolaan hanya berkisar 3.000 – 6.000 Ha, pembangunan HT Vietnam cukup kompetitif.
- d. Harga kayu HTI di Vietnam saat ini untuk diameter sd 12 cm mencapai USD 55/m<sup>3</sup> dan untuk di atas diameter 12 cm sd 30 cm mencapai USD 100/m<sup>3</sup>. Sebagai perbandingan, nilai tersebut setara dengan harga kayu Meranti di Indonesia saat ini hanya sebesar USD 100/m<sup>3</sup> di logpond pabrik. Sementara harga kayu HTI di Indonesia saat ini berkisar pada harga USD 50/m<sup>3</sup>.
- e. Insentif tax juga dinikmati oleh sektor hilir. Selain dibebaskan PPn log, pajak ekspor untuk industri *wood pellet* ditetapkan 0%, *wood chips* 2% dan kayu gergajian 25%, serta bunga pinjaman yang ringan sekitar 6 – 7%.
- f. Total pasokan bahan baku untuk industri pada tahun 2018 mencapai 31 juta m<sup>3</sup>, berasal dari produksi kayu HT sebesar 24 juta m<sup>3</sup> dan impor kayu 7 juta m<sup>3</sup>. Meskipun ada impor kayu, namun bisnis kehutanan masih menguntungkan. Sebagian besar bahan baku tersebut dialokasikan ke industri wood chips, furniture dan panel.
- g. Total nilai ekspor produk hutan Viet Nam pada tahun 2018 mencapai USD 9 Milyar, dengan tujuan ekspor ke 161 negara. Nilai ekspor Viet Nam ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia tahun 2018, di luar pulp dan kertas sebesar USD 5,6 Milyar.
- h. Selain hasil hutan kayu, Viet Nam juga mendorong pengolahan hasil hutan kayu antara lain berupa produk rotan, bambu, rumput/daun sejenis enceng gondok dan kulit jagung. Nilai ekspor HHBK pada tahun 2018 mencapai USD 1 juta. Pemerintah memberi insentif bagi industri HHBK yang sebagian besar merupakan perusahaan skala UMKM antara lain pinjaman bunga Bank yang rendah (6%), dukungan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan pembebasan royalty terhadap pemungutan HHBK dari kawasan hutan negara.
- i. Kinerja ekspor industri hasil hutan Viet Nam yang mengesankan tersebut, berdasarkan informasi dari Asosiasi Kehutanan Viet Nam maupun Duta Besar RI di Hanoi, dipengaruhi oleh faktor- faktor sebagai berikut:

**1) Ketersediaan tenaga kerja dan produktifitas yang tinggi.**

Tenaga kerja di Vietnam cukup melimpah dengan upah yang kompetitif, sekitar USD 250 sd USD 300 per bulan. Dengan jumlah jam kerja yang relatif sama dengan Indonesia, hasil yang diperoleh lebih besar.

## **2) Ketersediaan infrastruktur**

HTI di Viet Nam didukung oleh jaringan infrastruktur yang memadai dan akses ke industri yang lebih mudah seperti halnya hutan rakyat di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menjadikan nilai kayu yang lebih maksimal. Dengan harga kayu log HTI di Indonesia rata-rata USD 50/m<sup>3</sup>, sedangkan di Viet Nam USD 100/m<sup>3</sup>, maka pasar ke Viet Nam sangat terbuka.

## **3) Industri skala kecil – menengah**

Industri di Viet Nam dibangun dengan skala kecil menengah yang efisien dari bahan baku. Saat ini terdapat sekitar 4.500 UMKM yang menyumbang ekspor Viet Nam sekitar 42%.

## **4) Insentif untuk Penanaman Modal Asing**

Viet Nam memberikan banyak insentif untuk PMA, khususnya untuk membangun industri per kayu berorientasi ekspor. Saat ini terdapat 800 unit PMA yang bergerak di industri hasil hutan.

## **5) Kerjasama dengan Retailer Skala Dunia**

IKEA adalah salah satu retailer yang menanamkan investasinya di Vietnam, yang menerima produk dari industri hasil hutan Viet Nam. Bahkan kantor perwakilan IKEA untuk Asia Tenggara ditempatkan di Viet Nam. Dengan menggandeng IKEA, produk-produk Viet Nam dengan mudah tersebar di seluruh dunia.